



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8679-8689

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi Administrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Sarjan M^{1✉}, Rika Ramadhanti², Emilia Emharis³, Alsar Andri⁴, Sahri Muharam⁵
Administrasi Negara, Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: sarjan.fadlan@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah menggunakan teknologi informasi administrasi untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakatnya. Karena penggunaan teknologi akan mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, layanan serta desa akan lebih maju dan mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis kuantitatif. Adapun populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Talontam yang berjumlah 1.350 orang. Sedangkan yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 93 responden dengan menggunakan rumus Slovin dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Teknik pengumpulan data, dengan cara penyebaran angket, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dari 5 (lima) indikator yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berada pada kategori "Baik" dengan persentasi 63.2 %.

Kata kunci: *Teknologi, Informasi, Administrasi, Pelayanan Publik.*

Abstract

Talontam Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency has used administrative information technology to simplify services for its community. Because the use of technology will reduce costs, improve performance, services and villages will be more advanced and independent. The aim of this research is to find out how to use administrative information technology to improve public services. This type of research is descriptive with a quantitative analysis approach. The research population is the entire community of Talontam Village, totaling 1,350 people. Meanwhile, 93 respondents were used as research samples using the Slovin formula and sampling was carried out randomly. Data collection techniques, by distributing questionnaires, observation and documentation. The results of the research that has been carried out show that the use of administrative information technology to improve public services in Talontam Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency, from the 5 (five) indicators used as research measuring tools, it can be concluded that it is in the "Good" category with a percentage of 63.2% .

Keywords: *Technology, Information, Administration, Public Services.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan :

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Salah satu pengaturan desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 Huruf f mengatakan :

"Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum".

Salah satu tugas penting pemerintahan desa adalah memberi pelayanan administratif (surat menyurat) kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik itu dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Administrasi (selanjutnya disingkat TIA) adalah satu upaya untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yang diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan melalui peningkatan

efisiensi, inovasi, produktifitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. TIA yang diterapkan pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah di *update* oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional sehingga terjadi satu kesatuan data baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Namun harapan dari pemanfaatan TIA yang diterapkan pada Desa Talontam, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi masih perlunya kesungguhan dari aparat desa untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Sehingga tujuan dari penggunaan TIA dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan tidak ada lagi pelayanan yang lama, berbelit-belit, data yang terpadu serta kemudahan dalam pelayanan.

Sistem informasi desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bagian Ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86.

Ayat 3 :

"Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia".

Ayat 4 :

"Sistem informasi desa tersebut meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan".

Ayat 5 :

"Sistem informasi desa tersebut dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan".

Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputerisasi (komputer) dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara atau video (Williams dan Sawyer, 2003). Teknologi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim informasi (Martin, 2002).

Sedangkan teknologi informasi dalam administrasi didefinisikan sebagai segala usaha (baik dengan menggunakan alat, proses dan mekanisme kerja serta pengetahuan) agar proses kerja sama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan negara dengan lebih berkualitas, lebih proposional, lebih efektif dan lebih efisien (Akadun, 2009). Untuk mencapai keberhasilan pelayanan publik berbasis teknologi informasi administrasi di desa bahwa ada lima faktor yang menentukannya menurut Heeks, Gil-Garcia dan Pardo serta ADB yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, anggaran dan pelayanan teknologi informasi (dalam Mayowan, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa serta memaksimalkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma *positivisme* yang bersifat *logicohypotheco-verivikatif* yang berlandaskan asumsi mengenai objek empiris (Sugiyono, 2017). Populasi penelitian adalah masyarakat Desa Talontam yang berjumlah 1.350 orang, sedangkan yang dijadikan objek sampel penelitian 93 orang dengan menggunakan rumus Slovin dan pemilihan sampel yang dipilih secara acak. Teknik pengumpulan berupa penyebaran kuesioner, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner selanjutnya akan diberi skor sehingga menjadi data kuantitatif, untuk menentukan jumlah dari setiap pertanyaan maka peneliti menggunakan pengukuran skala likert. Dari skala likert, maka variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan ataupun pernyataan (Jamaludin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi Administrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
Sumber Daya Manusia

Indikator ini untuk menjawab kesiapan kemampuan sumber daya manusia untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dalam memberi pelayanan yang berkualitas. Untuk melihat hasil penelitian pada indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Penilaian untuk Indikator Sumber Daya Manusia

No	Sub Indikator	SB		B		CB		KB		TB		N	Σ	%	Kategori
		F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor		Skor		
1	Pengetahuan dan Keterampilan	0	0	9	36	84	252	0	0	0	0	93	288	61,9	Baik
2	Pengembangan Manajemen Keorganisasian	0	0	13	52	80	240	0	0	0	0	93	292	62,7	Baik
Jumlah		0	0	22	88	164	492	0	0	0	0	186	580	124,6	Baik
Rata-Rata													62,3		

Sumber: Data Olahan Lapangan 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa indikator sumber daya manusia diuraikan kedalam dua sub indikator, dimana sub indikator pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan memperoleh skor 288 dengan persentase 61,9 % berada pada kategori baik.

Sedangkan sub indikator kedua yaitu pengembangan manajemen keorganisasian memperoleh skor 292 dengan persentase 62,7 % berada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan dari indikator sumber daya manusia memperoleh skor 580 dengan rata-rata persentase 62,3 % berada pada kategori baik.

Dari penjelasan di atas bahwa faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhi pemberian layanan publik pada masyarakat. Menurut Michael Armstrong (dalam Hamali, 2016) menjelaskan bahwa agar pelayanan publik semakin baik dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setidaknya ada tiga aspek yang mesti diperhatikan dalam pencapaian tujuan, pertama adalah sumber daya manusia merupakan harta atau asset yang penting dalam menggerakkan organisasi pemerintah termasuk pemerintah desa sebagai sebuah organisasi. Kedua, keberhasilan sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan prosedur yang bertalian dengan manusia dalam organisasi saling berhubungan dan saling memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan. Ketiga, kultur dan nilai, suasana organisasi dan prilaku seorang pimpinan yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik.

Sarana dan Prasarana

Indikator sarana dan prasarana merupakan penggunaan sarana yang berbasis

teknologi informasi mencakup dari sarana itu sendiri dan sarana penunjang keberlangsungan pelayanan. Untuk melihat hasil jawaban indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penilaian untuk Indikator Sarana dan Prasarana

No	Sub Indikator	SB		B		CB		KB		TB		N	Σ	%	Kategori
		F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor		Skor		
1	Jaringan Internet	0	0	14	56	79	237	0	0	0	0	93	293	63,0	Baik
2	Kondisi Perangkat Komputer	0	0	16	64	77	231	0	0	0	0	93	295	63,4	Baik
Jumlah		0	0	22	88	164	492	0	0	0	0	186	588	126,4	Baik
Rata-Rata													63,3		

Sumber: Data Olahan Lapangan 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa indikator sarana dan prasarana diuraikan menjadi dua sub indikator. Dimana sub indikator pertama, yaitu jaringan internet memperoleh skor 293 dengan persentase 63,0 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub indikator kedua, yaitu kondisi perangkat computer memperoleh skor 295 dengan persentase 63,4 % berada pada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan indikator sarana dan prasarana memperoleh skor 588 dengan rata-rata persentase 63,2 % berada pada kategori baik.

Sarana prasarana merupakan faktor penunjang dalam pelayanan publik berbasis teknologi, sarana prasarana yang memadai akan mendukung penyelesaian pekerjaan, kondisi tempat yang nyaman fasilitas yang lengkap dan memadai maka pekerjaan akan lebih bersifat efisien dan efektif serta begitu juga dengan sarana dan prasarana eksternal seperti jaringan internet yang bagus akan mempercepat proses penyelesaian pelayanan administrasi berbasis elektronik.

Menurut Lewis dan Gilman (dalam Hayat, 2017) pelayanan publik adalah kepercayaan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara bertanggung jawab termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab akan sarana dan prasarana yang tersedia. Sedangkan menurut Parasuraman dan Berry (dalam Rinaldi, 2012) menjelaskan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan alat-alat berbasis elektronik lainnya merupakan bukti nyata dari pelayanan dan perhatian yang diberikan oleh si pemberi jasa.

Kelembagaan

Kelembagaan merupakan hal sangat penting dalam penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi, karena pada aspek kelembagaan menjadikan organisasi menunjukkan alur tanggung jawab untuk penerapan layanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk melihat penilaian jawaban pada indikator kelembagaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Data Penilaian untuk Indikator Kelembagaan

No	Sub Indikator	SB		B		CB		KB		TB		N	Σ	%	Kategori
		F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor		Skor		
1	Prilaku atau Sikap Staf/Pegawai	0	0	13	52	80	240	0	0	0	0	93	292	62,7	Baik
2	Harmonisasi Pimpinan dan Staf	0	0	22	88	71	213	0	0	0	0	93	301	64,7	Baik
Jumlah		0	0	35	140	151	453	0	0	0	0	186	593	127,4	Baik
Rata-Rata													63,7		

Sumber: Data Olahan Lapangan 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa indikator kelembagaan dapat diuraikan menjadi dua sub indikator. Dimana sub indikator pertama, yaitu perilaku atau sikap staf/pegawai memperoleh skor 292 dengan persentase 62,7 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub indikator kedua, yaitu harmonisasi pimpinan dan memperoleh skor 301 dengan persentase 62,4 % berada pada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan diketahui bahwa indikator kelembagaan memperoleh skor 593 dengan rata-rata persentase 62,4 % berada pada kategori baik.

Dalam konteks ini kelembagaan merupakan unsur pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014) mengatakan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana salah satu tugas pokok adalah melaksanakan urusan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat. Berjalannya pelayanan teknologi informasi dengan dalam pelayanan publik merupakan bagian dari terselenggaranya tugas urusan pemerintahan umum.

Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelayanan pada masyarakat khususnya yang terkait untuk pelayanan berbasis teknologi informasi akan menunjukkan keseriusan dari pemerintah desa. Untuk penilain jawaban indikator anggaran ini dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4. Data Penilaian untuk Indikator Anggaran

No	Sub Indikator	SB		B		CB		KB		TB		N	Σ Skor	%	Kategori
		F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor				
1	Pola Penganggaran	0	0	10	40	83	249	0	0	0	0	93	289	62,1	Baik
2	Ketersediaan dan Kemampuan Keuangan	0	0	10	40	83	249	0	0	0	0	93	289	62,1	Baik
Jumlah		0	0	20	80	166	498	0	0	0	0	186	578	124,2	Baik
Rata-Rata													62,1		

Sumber: Data Olahan Lapangan 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa indikator anggaran diuraikan menjadi dua sub indikator. Dimana sub indikator pertama, yaitu pola penganggaran memperoleh skor 289 dengan persentase 62.1 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub indikator kedua, yaitu ketersediaan dan kemampuan keuangan memperoleh skor 289 dengan persentase 62,1 % berada pada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan dapat diketahui bahwa indikator anggaran memperoleh skor 578 dengan rata-rata persentase 62,1 % berada pada kategori baik.

Anggaran merupakan alokasi keuangan desa untuk kegiatan layanan publik, karena aspek anggaran ini sangatlah penting dalam mempertahankan eksistensi layanan publik. Kegunaan anggaran dalam pelayanan publik berbasis elektronik yakni pembayaran tagihan beban internet, perbaikan jaringan, fasilitas dan jika memungkinkan termasuk di dalamnya adalah pembayaran honorarium untuk petugas teknis pengoperasian fasilitas teknologi informasi.

Pelayanan Teknologi Informasi

Keberhasilan pelayanan berbasis teknologi informasi dapat dilihat dari ketercapaian standar pelayanan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk indikator pelayanan teknologi informasi dengan mengacu pada standar pelayanan

yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Data Penilaian untuk Indikator Pelayanan Teknologi Informasi

No	Sub Indikator	SB		B		CB		KB		TB		N	Σ	%	Kategori
		F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor		Skor		
1	Pelayanan Teknologi Informasi Administrasi	0	0	20	80	73	219	0	0	0	0	93	299	64,3	Baik
2	Kebutuhan Pelayanan Teknologi Informasi Administrasi	0	0	24	96	69	207	0	0	0	0	93	303	65,1	Baik
Jumlah		0	0	44	176	142	426	0	0	0	0	186	602	129,4	Baik
Rata-Rata													64,7		

Sumber: Data Olahan Lapangan 2024

Berdasarkan table 5 di atas dapat diketahui bahwa indikator pelayanan teknologi informasi diuraikan menjadi dua sub indikator. Dimana sub indikator pertama, yaitu pelayanan teknologi informasi administrasi memperoleh skor 299 dengan persentase 64,3 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub indikator kedua, yaitu kebutuhan pelayanan teknologi informasi administrasi memperoleh skor 303 dengan persentase 65,1 % berada pada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan diketahui bahwa indikator pelayanan teknologi informasi memperoleh skor 602 dengan rata-rata persentase 64,7 % berada pada kategori baik. Baiknya tanggapan responden untuk indikator ini senada dengan yang dijelaskan oleh Akadun (2009) bahwa adanya layanan teknologi informasi adalah untuk memodernisasi organisasi pemerintah, memperkuat operasi mereka dan membuat mereka lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Dari jabaran tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang tersebar ke dalam 10 pertanyaan di atas, maka hasil rekapitulasi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

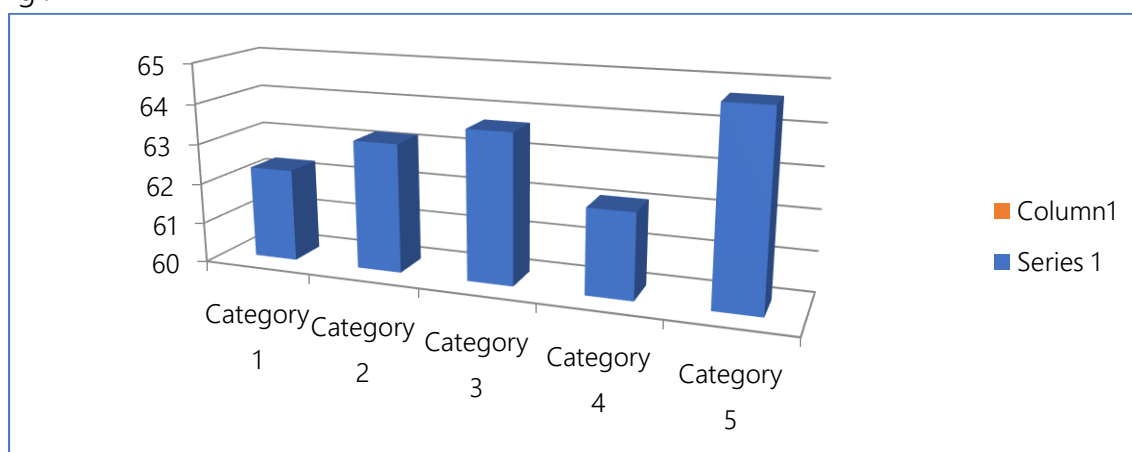
Tabel 6. Rekapitulasi Penggunaan Teknologi Informasi Administrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	N	Skor	Skor Max	%	Kategori
1.	Sumber Daya Manusia	93	580	930	62,3	Baik
2.	Sarana dan Prasarana	93	588	930	63,2	Baik
3.	Kelembagaan	93	593	930	63,7	Baik
4.	Anggaran	93	578	930	62,1	Baik
5.	Pelayanan Teknologi Informasi	93	602	930	64,7	Baik
Jumlah		465	2.942	4.650	316	Baik
Rata-Rata					63,2	

Sumber: Data Olahan Lapangan 2024

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa perolehan skor faktual penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi di peroleh persentase 63,2 % pada kategori "baik" yang berada pada rentang 60%-80%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1. Grafik Rekapitulasi Penggunaan Teknologi Informasi Administrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.



Berdasarkan grafik 1 di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 5 (lima) indikator dengan persentase tertinggi pada indikator ke 5 (lima) yaitu indikator pelayanan teknologi informasi dengan persentase 64,7 %. Berdasarkan kategori penilaian, dikategorikan baik. Sedangkan persentase terendah pada indikator ke 4 (empat) yaitu indikator anggaran dengan persentase 62,1 % berada pada

kategori baik. Untuk indikator pertama yaitu sumber daya manusia dengan persentase 62,3 % berada pada kategori baik. Indikator kedua yaitu indikator sarana dan prasarana dengan persentase 63,2 % berada pada kategori baik, serta indikator ketiga yaitu indikator kelembagaan dengan persentase 63,7 % berada pada kategori baik.

Jadi, hasil perhitungan dari seluruh indikator dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori "baik" dengan persentase 63,2 %.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik dengan persentase 63,2 %. Angka ini di peroleh dari hasil perhitungan seluruh indikator penelitian. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Desa Talontam agar dapat mempertahankan pemberian pelayanan publik berbasis teknologi informasi kepada masyarakat dan sekaligus menjadi contoh bagi pemerintah desa lainnya dalam memberikan pelayanan administrasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Arif Yusuf, Hamali. (2016). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Center For Akademic Publishing Service.
- Hanif Nurcholis. (2014). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, SP. Melayu. (2019). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamaludin, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Mayowan, Yunaidi. 2016. *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)*. Profil: Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 10 Nomor 1.
- Rinaldi, Rudi. 2012. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 2 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa